

Pengaruh Belanja Pemerintah dan PDRB Terhadap Peningkatan IPM di Indonesia Timur

Alhafiz Hamzah Firmansyah, Mohammad Wasil



Alhafiz Hamzah Firmansyah¹, Mohammad Wasil²; ^{1,2}Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang No. 2, Kec. Gayungan, Kota Surabaya 60231 (Gedung G2 Lt. 1), Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-07-12

Received in revised form 2023-25-12

Accepted 2024-23-01

Kata kunci:

Belanja Pemerintah; PDRB; IPM

Keywords:

Government Spending; GRDP; HDI

How to cite item:

Alhafiz Hamzah Firmansyah, Mohammad Wasil. (2024). Pengaruh Belanja Pemerintah dan PDRB Terhadap Peningkatan IPM di Indonesia Timur. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 5(1).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh besaran pendidikan, kesehatan, permukiman dan instalasi umum pemerintah daerah, serta PDRB terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi model data panel dengan lokasi penelitian di 13 provinsi yang terletak di Kawasan Timur Indonesia periode 2013-2021. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari belanja pemerintah daerah bidang pendidikan, kesehatan, permukiman dan instalasi umum yang bersumber dari publikasi DJPK Kemenkeu RI, PDRB dan IPM yang bersumber dari BPS. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial belanja pendidikan, kesehatan, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia. Sedangkan pengeluaran untuk permukiman dan instalasi umum mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia. Secara bersamaan belanja pendidikan, kesehatan, permukiman dan instalasi umum, serta PDRB mempunyai dampak yang signifikan terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia.

This research aims to see the influence of education, health, settlement, and public installations of local government, as well as GRDP on HDI in the Eastern Region of Indonesia. The analytical method used is panel data model regression analysis with research locations in 13 provinces in the Eastern Region of Indonesia for the 2013-2021 periods. The variables in this research consist of regional government spending in education, health, housing, and public installations fields which are sourced from the DJPK publication of the Indonesian Ministry of Finance, GRDP, and HDI which are sourced from BPS. The research results show that education, health, and GRDP spending partially have a positive and significant effect on HDI in the Eastern Region of Indonesia. Meanwhile, expenditure on housing and public installations has a negative and significant impact on HDI in the Eastern Region of Indonesia. Simultaneously, regional government spending on education, health, housing, and public installations, along with GRDP, had a significant impact on the HDI of the Eastern Region of Indonesia.

* Alhafiz Hamzah Firmansyah, Mohammad Wasil.

© 2024 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah mencapai 1.892.410,09 Km². Wilayah tersebut terdiri dari pulau-pulau dengan total 17.001 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan luas wilayah yang begitu luas dan kondisi wilayah yang berbentuk pulau-pulau, menimbulkan permasalahan ketimpangan pembangunan yang terjadi saat ini. Permasalahan ketimpangan sudah lama muncul khususnya antara Indonesia Bagian Barat dan Timur (Hapsari *et al.*, 2013). Hal ini disebabkan pembangunan di Indonesia lebih berpusat pada ibu kota dan pulau-pulau di wilayah Barat, khususnya Pulau Jawa (Hariani & Ekaria, 2023).

Menurut Todaro (dalam Suhyanto *et al.*, 2020), sumber daya manusia merupakan faktor utama penentu maju atau tidaknya suatu negara atau daerah. Pada tahun 1990 UNDP (*United Development Programme*), memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolak ukur dalam melihat kemajuan capaian pembangunan manusia suatu wilayah. IPM merupakan parameter dalam mengukur keberhasilan suatu daerah terkait dengan bagaimana penduduknya dapat mengakses hasil pembangunan berupa pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup yang layak (Suhyanto *et al.*, 2020). Ketimpangan kualitas sumber daya manusia antara wilayah Indonesia Barat dan Timur merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang kompleks.

Hal tersebut diperkuat dengan data yang tertulis pada publikasi BPS tahun 2023, yang tertulis provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta dengan skor 81,65 persen. Sedangkan Provinsi Papua menjadi provinsi dengan IPM terendah dengan skor 61,39 persen. Indonesia Bagian Timur meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua (Widyatami *et al.*, 2021). Berdasarkan publikasi BPS, hanya ada dua provinsi yang nilai IPMnya berada di atas rata-rata nasional (72,91), yakni Sulawesi Utara dan Bali dengan nilai masing-masing 73,81 dan 76,44 persen. Sementara itu terdapat sebelas provinsi dengan nilai IPM di bawah rata-rata nasional, dengan provinsi Papua Barat dan Papua menempati dua posisi terbawah secara nasional. Provinsi Papua Barat memperoleh skor IPM sebesar 65,89 persen dan Provinsi Papua 61,39 persen.

Dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah berencana melakukan pemerataan pembangunan antara Indonesia Bagian Barat dan Timur. Dachlan & Suhab (2014) (dalam Hariani & Ekaria, 2023) menyatakan bahwa Indonesia bagian Timur diidentikkan dengan keterbelakangan, keterisolasian dan kemiskinan sehingga saat ini menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat. Prioritas utama peningkatan IPM di provinsi Papua terbagi menjadi beberapa faktor seperti faktor transportasi, permukiman instalasi umum, faktor sanitasi, ekonomi, dan faktor kesehatan, serta pendidikan (Dalimunthe *et al.*, 2022). Selain anggaran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga berperan penting dalam meningkatkan IPM. Meningkatnya PDRB akan menimbulkan produksi berupa pendapatan per kapita dan akan mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat yang merupakan salah satu indikator IPM (Diba *et al.*, 2018).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memotret pengaruh besaran pendidikan, kesehatan, permukiman dan instalasi umum pemerintah daerah, serta PDRB terhadap IPM di wilayah Timur Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi model data panel dengan lokasi penelitian di 13 provinsi yang terletak di wilayah Timur Indonesia selama periode tahun 2013-2021.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia, seperti yang didefinisikan oleh UNDP pada tahun 2019, melibatkan perluasan pilihan dan peluang individu. Dalam kerangka kerja ini, populasi dianggap sebagai cerminan dari tujuan akhir dari semua upaya pembangunan. Definisi pembangunan manusia mencakup dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan definisi pembangunan yang terbatas pada pertumbuhan ekonomi (Suripto & Subayil, 2020). Dari perspektif pembangunan manusia dalam memahami dan menganalisis pembangunan, fokusnya adalah pada aspek populasi atau manusia daripada pertumbuhan ekonomi (Palayukan, 2019). Sementara itu, berdasarkan perhitungan IPM oleh BPS, setiap indikator penyusun IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Angka IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

3. Belanja Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mengacu pada alokasi dana untuk keperluan publik yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kemampuan masyarakat (Safitri *et al.*, 2021). Fokus utama belanja pemerintah adalah meningkatkan dan menjaga kualitas hidup masyarakat sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh daerah melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dan sosial, pelayanan umum, dan pengembangan jaminan sosial.

Dalam bukunya yang berjudul "*Algemeine Oder Theoristische Volkswirtschaftslehre*," Adolf Wagner (1991) menegaskan bahwa pengeluaran dan aktivitas pemerintah terus meningkat. Gagasan ini dikenal sebagai hukum pertumbuhan dan perluasan peran pemerintah (*Gesetz Des Wachsend Und Bedarf*). Inti dari teori Adolf Wagner adalah untuk menjelaskan besarnya peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan.

Teori Adolf Wagner kemudian disempurnakan oleh Alan T. Peacock dan Jack Wiseman, yang mendasarkan analisis mereka pada pengeluaran pemerintah. Menurut teori Peacock dan Wiseman, "pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan pajak yang semakin besar, meskipun masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut" (Prasetya, 2012).

Samuelson kemudian menyempurnakan teori pengeluaran pemerintah dengan memasukkan barang sektor swasta. Dalam teorinya, Samuelson menyatakan bahwa "adanya barang publik yang memiliki dua karakteristik, yaitu *non-excludable* dan *non-rivalry*. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik akan menentukan kuantitas barang publik yang akan disediakan melalui anggaran. Kuantitas barang publik yang disediakan ini selanjutnya akan menimbulkan permintaan terhadap barang lain (Basri & Subri, 2003).

4. Belanja Pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84/PMK.07/2009 tentang Pengalokasian Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa belanja pendidikan

adalah anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk mendanai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Penetapan alokasi belanja pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari total belanja APBD. Menurut Atmanti (2005), investasi di bidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap investasi pengembangan sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, semakin besar efisiensi dan produktivitas suatu negara (Atmanti, 2005).

5. Belanja Kesehatan

Todaro & Stephen (2000) menyatakan bahwa belanja kesehatan mengacu pada pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk mengakses layanan kesehatan, termasuk layanan dan fasilitas kesehatan, yang merupakan prasyarat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Menurut Astri *et al.*, (2013), pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dapat berdampak pada pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan sektor kesehatan tidak hanya bergantung pada sektor swasta atau pasar, tetapi lebih kepada layanan normatif yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, secara implisit dinyatakan bahwa alokasi minimum untuk belanja kesehatan adalah lima persen (5%) dari APBN, di luar gaji pemerintah pusat, serta sepuluh persen (10%) dari APBD, di luar gaji pemerintah daerah dan provinsi.

6. Permukiman dan Instalasi Umum

Alokasi dana untuk Pemukiman dan Instalasi Umum bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh perumahan yang layak dan akses ke layanan publik seperti listrik, air bersih, irigasi, telekomunikasi, transportasi, dan sanitasi yang berkelanjutan. Penyediaan anggaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap perumahan yang layak dan fasilitas umum yang penting (Fajar & Indrawati, 2020). Harapannya, belanja fasilitas publik akan meningkatkan kegiatan produksi dan berdampak pada pembangunan daerah.

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan indikator penting untuk menilai kemajuan ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan (Muliza *et al.*, 2017). Peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak pada pertumbuhan pendapatan individu, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa, yang membentuk salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Diba *et al.*, 2018).

8. Metodologi

Penelitian ini dilakukan di 13 provinsi di kawasan Timur Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan, pemukiman dan fasilitas umum, dan PDRB terhadap peningkatan IPM di kawasan Timur Indonesia selama periode tahun 2013-2021.

Populasi yang diteliti adalah pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, pemukiman & instalasi umum, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga berbasis PDRB, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per provinsi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumentasi, yaitu dengan mengacu pada jurnal penelitian terdahulu sebagai referensi dan mengumpulkan dokumen Laporan Realisasi Belanja per fungsi Pemerintahan, data PDRB, dan IPM per provinsi. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi Laporan Realisasi Belanja per fungsi Pemerintahan dari DJPK Kemenkeu RI tahun 2013-2021.

9. Hasil Pembahasan

a. Uji Chow

Menilik hasil output analisis Chow, diketahui bahwa nilai probabilitas F dan Chi-square sebesar 0,0000 lebih kecil dari $< 0,05$, sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dan dilanjutkan dengan Uji Hausman. Deskripsi data bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang sebaran atau distribusi data.

H0: Common Effects Model

H1: The Fixed Effects Model

Tabel 01. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	106.112431	(12,100)	0.0000
Cross-section Chi-square	306.520987	12	0.0000

Sumber : Data Diolah (2024)

b. Uji Hausman

Berdasarkan hasil output analisis Hausman, diketahui bahwa nilai *random probability* sebesar 0.0535 lebih besar dari > 0.05 . Model yang terpilih adalah *Random Model Effect* (REM).

H0: Random Effect Model

H1: Fixed Effect Model

Tabel 02. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.323341	4	0.0535

Sumber : Data Diolah (2024)

c. Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil output analisis normalitas, diperoleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,223587. Nilai probabilitas Jarque-Bera yang diperoleh lebih besar dari $0,223587 > 0,05$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dan model regresi yang digunakan telah memenuhi persyaratan analisis normalitas. Sementara itu, hasil analisis multikolinearitas, koefisien korelasi variabel-variabel independen seperti variabel pendidikan, kesehatan, pengeluaran belanja pemukiman dan instalasi umum, dan PDRB diketahui kurang dari $< 0,90$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dari model regresi yang digunakan.

Pada tabel output hasil analisis heteroskestisitas dengan menggunakan uji Harvey menunjukkan bahwa nilai probabilitas $Obs \cdot R\text{-Squared}$ dari variabel independen lebih besar dari α , yaitu $0,4097 > 0,05$. Dapat didefinisikan model regresi yang digunakan terbebas dari Heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas, dan Normalitas (Iqbal, 2015). Menurut Iqbal (2015), dalam regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang digunakan dalam metode OLS diterapkan. Hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas yang digunakan.

d. Uji Parsial (t)

Hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa semua variabel independen seperti pengeluaran untuk pendidikan (X1), kesehatan (X2), pemukiman dan instalasi umum (X3), dan PDRB (X4) berpengaruh terhadap variabel IPM dengan nilai probabilitas t-hitung masing-masing sebesar 0.0031; 0.0059; 0.0000; 0.0000 yang lebih kecil dari 0.05.

Tabel 03. Uji Parsial (t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.74162	5.764607	5.506295	0.0000
LOG_X1	0.446198	0.147333	3.028495	0.0031
LOG_X2	0.807241	0.287824	2.804633	0.0059
LOG_X3	-0.721999	0.168052	-4.296274	0.0000
LOG_X4	1.227772	0.218205	5.626698	0.0000

Sumber : Data Diolah (2024)

e. Uji Simultan (f)

Hasil output pengolahan data menunjukkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.00000 lebih kecil dari < 0.05 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pendidikan (X1), kesehatan (X2), pemukiman dan instalasi umum (X3), dan PDRB (X4) secara simultan berpengaruh terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia.

Tabel 04. Uji Simultan (f)

Weighted Statistics			
Root MSE	1.046444	R-squared	0.526693
Mean dependent var	7.227844	Adjusted R-squared	0.509789
S.D. dependent var	1.527595	S.E. of regression	1.069547
Sum squared resid	128.1203	F-statistic	31.15816
Durbin-Watson stat	1.516609	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data Diolah (2024)

f. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menilik hasil output pengolahan data, nilai *Adjusted R-squared* yang diperoleh adalah sebesar 0.509789. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel IPM mampu dijelaskan oleh variabel belanja pendidikan, kesehatan, pemukiman dan instalasi umum, dan PDRB sebesar 50,9%. Sedangkan 49,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Peningkatan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan (X1) oleh pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia berdampak positif dan signifikan terhadap IPM, yang dibuktikan dengan koefisien sebesar 0,446198 dan nilai probabilitas sebesar 0,0031 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sanggelorang *et al.*, 2015) (Setiawan & Fikriah, 2020) , dan (Taime & Djaelani, 2021) yang mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk pendidikan dapat mempengaruhi IPM di wilayah tersebut.

Peningkatan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan (X2) oleh pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia berdampak positif dan signifikan terhadap IPM. Nilai koefisien sebesar 0.807241 dan nilai probabilitas sebesar 0.0059 yang lebih kecil dari 0.05 mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk fungsi kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mengalokasikan lebih banyak dana untuk fungsi kesehatan akan menyebabkan peningkatan IPM di Kawasan Timur Indonesia.

IPM di Kawasan Timur Indonesia dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh pengeluaran pemerintah daerah untuk pemukiman dan instalasi publik (X3), yang dibuktikan dengan koefisien sebesar -0,721999 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05. Renggo (2013) dalam (Putra, 2019) menyatakan bahwa diperlukan beberapa waktu untuk merasakan manfaat dari hasil pembangunan permukiman dan instalasi umum terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dampak dari belanja permukiman dan instalasi umum terhadap peningkatan IPM akan terlihat di masa yang akan datang.

PDRB (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia dengan koefisien sebesar 1,227772 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini konsisten dengan penelitian Fahmi (2018) dan Muliza *et al.* (2017). Pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, pemukiman dan instalasi umum, dan PDRB secara simultan memiliki dampak yang signifikan terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia, dan nilai probabilitas F-statistik 0,00000 kurang dari $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

10. Penutup

Variabel belanja pendidikan (X1) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM di 13 Provinsi Kawasan Timur Indonesia. Hal ini berarti peningkatan belanja pendidikan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM. Semakin besar alokasi dana untuk pendidikan akan meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap layanan pendidikan yang berkualitas yang merupakan faktor fundamental bagi IPM. Variabel belanja kesehatan (X2) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap IPM di 13 provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Peningkatan belanja kesehatan akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup penduduk, yang mengarah pada peningkatan secara keseluruhan.

Variabel Pemukiman dan Instalasi Publik (X3) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap IPM di 13 provinsi di Kawasan Timur

Indonesia. Hasil negatif yang diperoleh disebabkan oleh keterbatasan waktu penelitian, karena belanja permukiman dan fasilitas umum merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya baru dapat dirasakan setelah melewati periode tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dampak belanja permukiman dan fasilitas umum terhadap peningkatan IPM akan terlihat di masa yang akan datang.

Variabel PDRB (X4) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM di 13 provinsi Kawasan Timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mendorong peningkatan pertumbuhan output per kapita, sehingga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli akan berkontribusi pada peningkatan standar hidup yang merupakan salah satu komponen penyumbang IPM. Secara simultan, variabel pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, permukiman dan instalasi publik, PDRB memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adolf Wagner. 1991. *Allgemeine oder theoretische Volkswirtschaftslehre* (Verbindung zur klassischen Schule, Ed.). Schaffer Poeschel.
- Basri, Y. Z., & Subri, M. 2003. *Keuangan negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Raja Grafindo Persada.
- Dalimunthe, A. A., Fitrianto, A., Sartono, B., & Oktarina, S. D. 2022. Regency clusterization based on village characteristics to increase the human development index (IPM) in Papua Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 21, No. 02, pp. 153–168.
- Fahmi, A. 2018. Pengaruh *good governance*, belanja fungsi pendidikan dan kesehatan, dan PDRB perkapita terhadap IPM. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, Vol. 2, No. 1, pp. 23–34.
- Fajar, M. A., & Indrawati, L. 2020. Pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja perumahan dan fasilitas umum terhadap indeks pembangunan manusia (studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Cianjur). *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol. 1, No. 1, pp. 108–118.
- Hapsari, S. A. D., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. 2013. Pertumbuhan inklusif: fenomena pertumbuhan inklusif di kawasan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 2, No. 2, pp. 85–112.

- Hariani, V. H. L., & Ekaria, E. 2023. Pengaruh pengangguran, sanitasi, TIK terhadap IPM dan melalui kemiskinan kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia 2021. *Seminar Nasional Official Statistics*, No. 1, pp. 601–610.
- Iqbal, M. 2015. *Regresi Data Panel (2): Tahap Analisis*. Blog Dosen Perbanas, 2, pp. 1–7.
- Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. 2017. Analisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec)*, Vol. 3, No. 1, pp. 51–69.
- Palayukan, M. 2019. Pengaruh belanja pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia: studi kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, Vol. 12, No. 2, pp. 74–91.
- Prasetya, F. 2012. *Modul Ekonomi Publik - Teori Pengeluaran Pemerintah: Vol. V*. Universitas Brawijaya Press.
- Sanggalorang, S., Rimate, V., & Siwu, H. 2015. Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, VI. 15, No. 3.
- Setiawan, A., & Fikriah, F. 2020. Pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5, No. 4, pp. 212–221.
- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. 2020. Pengaruh Dana transfer dana desa dan PAD terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, Vol. 4, No. 3, pp. 285–305.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suripto, & Subayil, L. 2020. Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di D. I. Yogyakarta periode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, pp. 127.
- Taime, H., & Djaelani, P. N. 2021. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, Vol. 1, No. 1, pp. 54–66.
- Widyatami, A. I., Natungga, G. S., Damayanti, R., Dewi, S. E., & Siagian, T. H. 2021. Determinan unmet need pada wanita usia subur menikah di kawasan indonesia timur. *Jurnal Keluarga Berencana*, Vol. 6, No. 1, pp. 31–41.